

Hutama Prasarana Dapat Bridging Rp720 Miliar

JAKARTA—PT Utama Karya akan memberikan dana talangan (*bridging*) Rp720 miliar kepada anak perusahaannya, PT Utama Prasarana Nusantara, yang akan menggarap jalan tol Medan-Binjai, Sumatra Utara sepanjang 16 kilometer.

Dimas Novita S.
redaksi@bisnis.co.id

Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya Ari Widiyantoro mengatakan saat ini pembentukan anak usaha untuk Medan-Binjai sudah mencapai tahap perizinan komisaris.

"Setelah keluar izinnya maka ekuitas dari konsorsium sudah harus disetor," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Senin (8/4).

"Adapun komposisi saham konsorsium tersebut, lanjutnya, Utama Karya menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi kepemilikan sebesar 60%, sementara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, III, dan IV, serta perusahaan daerah Sumut masing-masing menguasai 10% saham.

Dia menyampaikan untuk modal awal anak perusahaan tersebut, PT Utama Prasarana Nusantara akan mendapatkan pinjaman awal dari induk perusahaan.

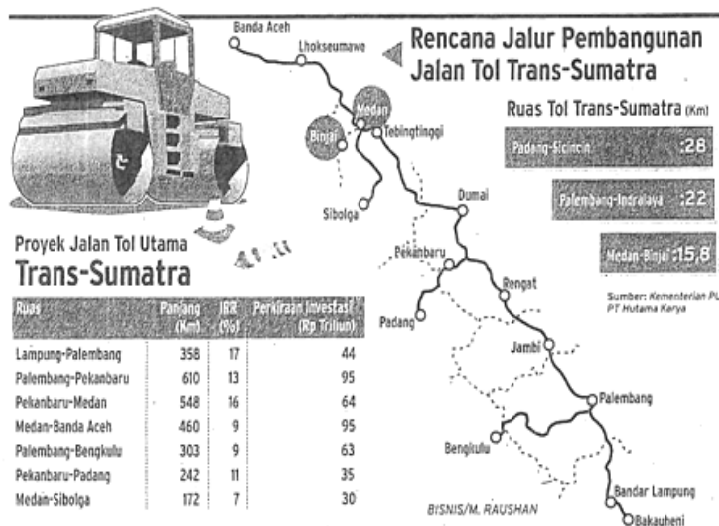
Seperti yang diketahui, sumber permodalan investasi tol bernilai Rp4 triliun tersebut, 30% berasal dari perusahaan dan 70% merupakan pendanaan dari perbankan.

"Perusahaan akan memberikan *bridging* [pinjaman sementara] sebesar Rp720 miliar," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, untuk 70% pendanaan lainnya, perusahaan juga tengah menajaki skema pembiayaan di luar pinjaman bank lokal.

"Kami juga lagi mengkaji pinjaman dari penjaminan infrastruktur baik SMI [PT Sarana Multi Infrastruktur] atau PII [PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia], bank asing, atau juga obligasi perusahaan untuk mencari yang paling menguntungkan," ucapnya.

Ari menjelaskan Utama Karya menargetkan *ground breaking* ruas tol Medan-Binjai dapat dilakukan pada akhir semester I/2013.



Menurutnya, ruas tersebut paling siap untuk dieksekusi karena trase tol yang direncanakan melewati lahan yang dimiliki PTPN, yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN). "Karena area yang dilewati milik PTPN yang juga difasilitasi

oleh BUMN, sehingga pembebasan tanahnya pun jadi cepat, selain itu UU No. 2/2012 [tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum] juga mendukung hal tersebut," tuturnya.

RUAS LAIN

Selain itu, dukungan dari kecepatan pembebasan tanah, sudah keluarnya hasil studi kelayakan, jalannya desain, dan survei lapangan oleh tim yang dikerahkan perusahaan menjadi faktor lain-

nya mengapa ruas Medan-Binjai paling siap untuk dibangun.

Lebih lanjut, Ari mengatakan selain ruas Medan-Binjai, perusahaan juga menyiapkan opsi ruas lain yang akan dibangun tahun ini yakni Palembang-Indralaya, Babakan-Jati Agung, dan Batam.

Dia menjelaskan perusahaan harus melakukan persiapan yang lebih juga menentukan ruas mana yang menjadi prioritas.

"Kami akan melihat ruas mana yang paling memungkinkan untuk dibangun sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada sejalan dengan persiapan pembentukan anak usaha untuk masing-masing ruas nantinya," tuturnya.

Seperti diketahui, Utama Karya mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun jalan tol sepanjang 2.700 km bernilai Rp360 triliun.

Meskipun perusahaan sudah melakukan banyak persiapan, sayangnya hingga kini payung hukum yang dijanjikan pemerintah dari awal tahun ini tak kunjung terbit. □

Perpres Penunjukan Segera Terbit

PALEMBANG—Kementerian BUMN mendorong peraturan Presiden (perpres) yang mengatur pembangunan jalan tol trans-Sumatra dapat segera terbit agar PT Utama Karya bisa merealisasikan proyek tersebut.

Menteri BUMN Dahlan Iskan memperkirakan Perpres yang penerbitannya telah molor dari rencana awal itu tidak lama lagi akan keluar.

"Semua menteri sudah setuju dengan rencana ini, saya kira tidak lama lagi akan dinaikkan ke Presiden, kita tunggu saja. Tentu dari Kementerian BUMN mendorong ini cepat terbit," katanya sesuai meresmikan *ground breaking* pabrik Pusri II B di Palembang, Senin (8/4).

Seperti diketahui sebelumnya, PT Utama Karya yang ditunjuk sebagai pemegang konsesi proyek Trans-Sumatra

High Way menargetkan dapat merealisasikan pembangunan 3 trase, yaitu Palembang-Indralaya, Medan-Binjai, dan Padang-Sicincin pada tahun ini.

Namun, hingga kini perpres yang akan mengatur penyertaan modal negara untuk proyek itu belum juga keluar. Padahal, Utama Karya mengaku secara teknis perusahaan telah siap memulai proyek itu. (Dinda Wulandari)